

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain rencana tersebut setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, (Renstra SKPD) dan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja SKPD).

Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan salah satu pola menetapkan perencanaan kebijakan program secara tepat. Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, maka dokumen rencana stratejik ini merupakan rencana panjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas serta berpedoman kepada RPJM Kota Mataram mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dijabarkan lebih lanjut ke Dalam Dokumen Rencana Operasional Tahunan (Renja Dinas).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan/landasan Normatif sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
6. Peraturan Walikota Mataram Nomor 16/PERT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.

1.3. Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram tahun 2011-2015 disusun dengan maksud sebagai pola perencanaan jangka menengah yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas dalam rangka penjapaian tujuan dinas yang antara lain memuat :

1. Secara jelas arah masa depan yang hendak dituju yang terangkum dalam perumusan Visi, Tujuan dan Sasaran.
2. Mempertimbangkan kondisi saat ini
3. Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan, program dan kegiatan.
4. Ukuran keberhasilan berupa Indikator kinerja.

- ❖ Tujuan
 1. Mengintegrasikan antara keahlian SDM dan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan
 2. Sebagai langkah awal untuk pengukuran kinerja.
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas program
 4. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dibudpar Kota Mataram.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM. SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM

Pelayanan secara umum adalah usaha membantu, mengurus apa yang dibutuhkan orang lain, sedangkan dalam konteks pariwisata diartikan sebagai usaha mencurahkan segenap kemampuan, perasaan dan keterampilan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pelanggan/klien.

Pelayanan memiliki karakteristik umum dan dalam bidang pariwisata terdapat karakteristik khusus yang perlu di cermati secara khusus pula. Hal ini dipandang penting untuk mendukung pelayanan pariwisata tersebut sebagai bagian dari tugas yang diemban lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Mataram berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan bidang kebudayaan dan pariwisata.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

Disbudpar Kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 16/PERT/2008 tanggal, 8 Agustus 2008 tugas pokok dan fungsi Disbudpar Kota Mataram adalah sebagai berikut :

▪ Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

Disbudpar Kota Mataram adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Disbudpar Kota Mataram mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- **Fungsi Disbudpar Kota Mataram**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas maka Disbudpar Kota Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota Mataram sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas dan fungsi unsur organisasi adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut kepada dinas mempunyai fungsi : a. dst.

2. **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagia Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Tugas Pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketata usahaan Dinas yang meliputi Urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian. Adapun pungsi dari Sekretaris adalah :

- Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas.
- Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas.

- Pelaksanaan Pelayanan Tehnis Administratif Kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas.
- Perumusan Pedoman dan petunjuk Tata Laksana Administrasi Umum
- Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup dinas.
- Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan Administrasi Umum, Perencanaan, keuangan, Kepagawaian dan Perlengkapan.
- Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem Informasi Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Instansi Terkait.
- Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

3. Bidang Bina Kebudayaan

Bidang Bina Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis pelayanan Bina Kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Bina Kebudayaan mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan Program Kerja dan Penetapan Kinerja Bidang.
- Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya.

- Perumusan Kebijakan teknis Dibidang Bina kebudayaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Penyelenggaraan pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Bimbingan Tehnis Dibidang Bina Kebudayaan.
- Pelaksanaan Koordinasi, Informasi dan Sinkronisasi Perangkat kerja Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksana program/kegiatan Dibidang Bina Kebudayaan.
- Perumusan dan Penjabaran Pedoman, Norma, Standar Prosudur dan Kriteria Dibidang Bina Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pengkoordinasian Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Bina Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data Dibidang Bina Kebudayaan sebagai bahan penusunan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis Dibidang Bina Kebudayaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi / Lembaga terkait pemberian penghargaan kepada Budayawan dan Seniman yang telah berjasa / membina budaya daerah serta penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan dan pengayaan sejarah dan kepurbakalaan.
- Pelaksanaan pasilitasi bantuan kepada kelompok/sanggar seni budaya dalam rangka Bina kebudayaan dan Pengembangan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

4. Bidang Bina Kepariwisataan

Bidang Bina Kepariwisataan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis pelayanan Bina Kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Bidang Bina Kepariwisataan mempunyai fungsi :

- perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
- perumusan kebijakan teknis bidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis dibidang bina kepariwisataan;
- pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan dibidang bina kepariwisataan;
- perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria dibidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang bina kepariwisataan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan ;
- pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dan peluang investasi dalam rangka pengembangan dan pembangunan obyek wisata di daerah ;

- pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- pelaksanaan fasilitasi bantuan untuk pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang.
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan

Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis pelayanan bidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan mempunyai fungsi :

- perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.
- pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya.
- perumusan kebijakan teknis dibidang perijinan ,pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.
- pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.

- perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.
- pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang.
- Pelaksanaan tugas tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Struktur Organisasi**

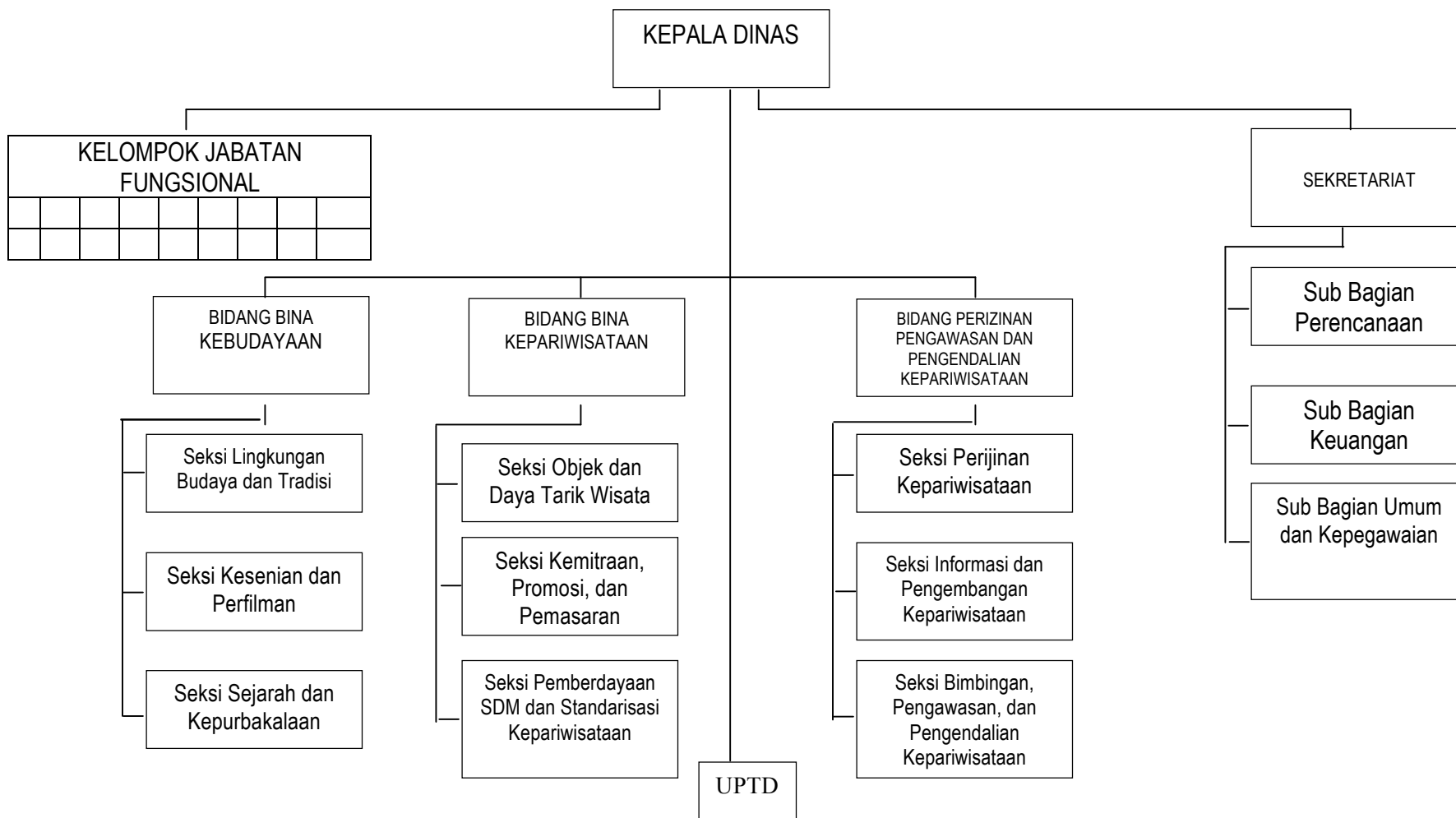
Struktur Organisasi pada unit Kerja Budpar Kota Mataram sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 Jabatan Eselon II/b, 1 Eselon III/a, 3 Eselon III/b, 12 Eselon IV/a. Berdasarkan Struktur atau Susunan Organisasi Budpar Kota Mataram terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Bidang Bina Kebudayaan
4. Bidang Bina Kepariwisata
5. Bidang Perijinan Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

Masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) Kepala seksi sedangkan Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kasubag.

Untuk lebih jelasnya Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MATARAM**



2.2. Sumber daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

2.2.1. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

a. Sumber Daya yang Berasal Dari Internal.

Berdasarkan data kepegawaian Tahun 2010 jumlah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram sebanyak 41 orang, terdiri dari 39 orang PNS dan 2 orang tenaga honor daerah. Jenjang pendidikan dan kepangkatan yang relatif beragam, dimana jenjang pendidikan yang paling banyak S1, dengan pangkat berkonsentrasi pada golongan III (tiga). Dari 41 orang tersebut 6 orang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan atau sekitar 14.6%.

Adapun komposisi dan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Komposisi Pendidikan dan Kepangkatan PNS Lingkup
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

| Status | Gol. | Pendidikan | | | | Jumlah | Keterangan |
|---------------|-------|------------|----------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| | | SMA/SMK/SD | D.3 | S.1 | S.2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Org | IV/c | | | | 1 | 1 Org | Magister Hukum |
| 1 Org | IV/b | | | 1 | | 1 Org | 1 Org S1 Perikanan |
| 3 Org | IV/a | | | 1 | | 1 Org | 1 Org Magister Adm. |
| | | | | 1 | | 1 Org | 1 Org SI Hukum |
| | | | | | 1 | 1 Org | 2 Org Magister Manajemen |
| 11 Org | III/d | | | 4 | | 4 Org | 4 Org S1 Ekonomi |
| | | | | 5 | | 5 Org | 5 Org S1 Hukum |
| 1 Org | III/c | | 1 | | | 1 Org | 1 Org D3 APDN |
| 2 Org | III/b | | | 1 | | 1 Org | 1 Org S1 Ekonomi |
| | | | | 1 | | 1 Org | 1 Org S1 Sastra |
| 6 Org | III/a | | | 1 | | 1 Org | 1 Org S1 Ekonomi |
| | | | | 1 | | 1 Org | 1 Org S1 Sosial |
| | | | | 1 | | 1 Org | 1 Org S1. Ilmu Politik |
| | | | | 2 | | 2 Org | 2 Org S1 Hukum |
| | | | 1 | | | 1 Org | 1 Org D3 Pariwisata |
| | | 1 | | | | 1 Org | 1 Org SMA |
| 2 Org | II/d | | 1 | | | 1 Org | 1 Org D3 Pariwisata |
| | | 1 | | | | 1 Org | 1 Org SMA |
| 3 Org | II/c | 3 | | | | 3 Org | 3 Org SMA |
| 3 Org | II/b | 3 | | | | 3 Org | 3 Org SMA |
| 4 Org | II/a | 3 | | | | 3 Org | 3 Org SMA |
| | | 1 | | | | 1 Org | 1 Org SMK |
| Honda | - | 1 | | | | 1 Org | 1 Org SMK |
| 2 Org | - | 1 | | | | 1 Org | 1 Org SD |
| PTT | - | 3 | | | | 3 Org | 3 Org SMA |
| 4 Org | - | 1 | | | | 1 Org | 1 Org SMK |
| Jumlah | | 18 | 3 | 19 | 2 | 42 Org | |

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas sudah tentu diperlukan sarana dan prasarana, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

| No | Bidang | Kend. R.2 | Kend.R.4 | Komputer | | Meubler |
|---------------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | PC | Laptop | |
| 1 | Kepala | | 1 | - | - | 2 |
| 2 | Sekretariat | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 3 | Bina Pariwisata | 1 | - | - | 1 | 9 |
| 4 | Perizinan | 1 | - | 1 | - | 8 |
| 5 | Bina Kebudayaan | 1 | - | 1 | - | 8 |
| Jumlah | | 6 | 2 | 6 | 2 | 42 |

b. Sumber Daya yang Berasal Dari External.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram disamping menggunakan sumber daya dari internal juga menggunakan sumber daya external. Sumber daya yang berasal dari luar (external) meliputi antara lain :

- Dewan Kesenian Daerah
- Majelis Budayawan daerah
- PHRI
- ASITA
- Hotel
- Restoran

Dalam melaksanakan kegiatan atau pagelaran kesenian dan budaya selalu melibatkan unsur dari Dewan Kesenian dan majelis budayawan. Keterlibatan Dewan Kesenian dan Majelis Budayawan terletak pada penyusunan konsep/skenario pagelaran kesenian / budaya yang dilaksanakan di dalam daerah maupun luar daerah.

Peran dari Dewan Kesenian dan Majelis Budayawan sangat penting dalam kerangka kita melestarikan kesenian - kesenian tradisional dan Budaya daerah yang berlaku di Kota Mataram .

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

▪ Usaha Jasa Pariwisata

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Usaha Jasa Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram telah melakukan kegiatan pelatihan Manajemen pengelolaan Rumah Makan dan Restoran serta Pelatihan Pemandu Wisata.

Dalam penyelesaian proses izin usaha pariwisata telah dapat dilakukan penyederhanaan prosedur dengan limit waktu penyelesaian selama 2 (dua) minggu tanpa mengurangi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

▪ Budaya

Dalam rangka memberikan ruang kepada para seniman untuk berkreasi telah dilaksanakan pagelaran kesenian secara rutin, tersedianya event tetap melalui festival art sayang-sayang, terbentuknya Majelis Budayawan Daerah, pelestarian Budaya dan Kesenian melalui kegiatan pembinaan secara berkelanjutan.

Selama kurun waktu 2005 - 2009 perkembangan sanggar kesenian di Kota Mataram tidak banyak mengalami perubahan namun tetap eksis, hal ini ditunjukkan dengan jumlah sanggar kesenian seperti yang tampak pada tabel berikut :

Tabel : 2.1.
Pelayanan Umum Bidang kebudayaan

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Sanggar Kesenian | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 2 | Situs Bersejarah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sedangkan situs bersejarah yang dilestarikan berjumlah 5 (lima) buah yaitu Taman Mayure, Pure Meru, Makam Loang Baloq, Makam Van Ham dan Makam Bintaro.

▪ Promosi

Promosi Pariwisata yang selama ini dilakukan melalui kegiatan event pariwisata diluar daerah telah diperkuat lagi dengan terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah

Kota Mataram menjadikan kegiatan-kegiatan Promosi Pariwisata akan menjadi lebih efektif.

- **Destinasi**

Destinasi Pariwisata yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram meliputi Destinasi Taman Rekreasi Loang Baloq yang anggarannya bersumber dari APBD Kota dan Provinsi. Terbangunnya Destinasi Taman Rekreasi Loang Baloq berarti ada penambahan 1 (satu) Destinasi baru yang berlokasi di Lingkar Selatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dalam melaksanakan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan dan misi secara efektif dan efisien, sangat ditentukan indikator berupa peluang dan tantangan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

- a. Perangkat regulasi teknis pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan yang belum memadai.
- b. Sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional yang ada belum dapat secara maksimal mengakomodasi permasalahan pariwisata seni dan budaya yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
- c. Belum adanya pertunjukan seni budaya yang dapat dinikmati secara reguler disudut-sudut kota tersentuh oleh masyarakat dan wisatawan.
- d. Apresiasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata seni dan budaya masih terbatas dan belum menyeluruh.
- e. Tekanan dan kecenderungan terhadap isu keamanan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sosial yang akan berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.
- f. Masuknya arus budaya global di kalangan generasi muda yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai seni budaya daerah.

- g. Terjadinya Bencana Alam yang merusak infrastruktur sarana dan prasarana menuju ke obyek-obyek wisata dan tempat-tempat lainnya yang menjadi fokus kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kunjungan wisatawan

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

1. Adanya koordinasi yang baik antara unit kerja sehingga memudahkan dalam menyusun program kerja khususnya yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan.
2. Adanya program dan kegiatan urusan pilihan pariwisata dan budaya. Program dan kegiatan bidang Pariwisata dan Budaya diadakan dalam upaya pembinaan, pengembangan dan pelestarian pariwisata dan budaya daerah.
3. Predikat Kota Mataram sebagai Kota Pendidikan pemerintahan dan jasa.
4. Obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kota Mataram cukup beragam mulai dari obyek wisata pendidikan, sejarah, budaya, minat khusus dan fasilitas MICE.
5. Adanya tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dalam meningkatkan kinerja profesionalismenya.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dalam hal penyediaan sarana prasarana pariwisata, akomodasi, transportasi dan pusat-pusat perbelanjaan dan dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah.
7. Kepedulian institusi pendidikan khususnya pendidikan dibidang kepariwisataan serta dukungan para Budayawan dan seniman untuk secara bersama-sama memajukan dunia kepariwisataan khususnya di Kota Mataram.
8. Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan wisata nusantara dengan program "*Cintai Negerimu, Kenali Negerimu*".

2.4.3. Macam-macam Pelayanan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

a) Kebudayaan

(Bidang Bina Kebudayaan)

- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Peningkatan Pemahaman Bimbingan Tehnis dibidang seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
- Pelaksanaan terkait pemberian penghargaan kepada Budayawan dan Seniman yang telah berjasa / membina budaya daerah serta penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan dan pengayaan sejarah dan kepurbakalaan.
- Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya
- Peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi Seni dan Budaya
- Pengembangan dan aktualisasi Seni dan Budaya tradisi dan kearifan lokal daerah dan Nusantara.
- Fasilitasi penyelenggaraan festival Seni dan Budaya Daerah.
- Monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keaneka ragaman Seni dan Budaya.
- Fasilitasi kemitraan pengelolaan Seni dan Budaya antar daerah dan nusantara.

b) Pariwisata

Penyediaan Pelayanan Perizinan bidang Pariwisata

(Bidang Perizinan , Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan)

1) Usaha jasa pariwisata

Meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan Pariwisata Seperti :

- Jasa Biro Perjalanan Wisata
- Jasa Agen Perjalanan Wisata
- Jasa konvensi
- Jasa Informasi dan Konsultan Pariwisata

2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan menjelaskan Obyek dan Daya Tarik Wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang telah ada. Usaha tersebut dibagi dalam 3 (tiga) kelompok :

- Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam
- Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata Budaya
- Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata Minat Khusus

3) Usaha Sarana Pariwisata, meliputi kegiatan pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata, usaha tersebut berupa jenis - jenis usaha :

- Penyediaan Akomodasi
- Penyediaan Makan dan Minum
- Penyediaan sarana wisata tirta
- Kawasan Pariwisata

c). Bidang Bina Kepariwisataan

- Pembinaan, dan Peningkatan Pemahaman serta Bimbingan Tehnis
- Operasional dibidang usaha pariwisata.
- Peningkatan pelayanan kualitas dan kuantitas event promosi Pariwisata Daerah
- Monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha Pariwisata.
- Fasilitasi kemitraan pemerintah dan pengelola pelaku Usaha Pariwisata.

BAB. III

ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dilihat dari letak geografis dan tersedianya fasilitas infrastruktur Kota Mataram mempunyai posisi yang strategis bagi pengembangan daya dukung kawasan wisata Pulau Lombok dan Sumbawa, karena :

1. Sebagai Ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram menjadi pusat segala kegiatan seperti Pusat Pemerintahan, pusat pendidikan, pusat prekonomian, pusat seni dan budaya.
2. Berada disegi tiga emas Daerah tujuan wisata Bali, Tanah Toraja dan Pulau Komodo.

Sejalan dengan kondisi masyarakat yang butuh akan berwisata dan semakin banyaknya orang melakukan kegiatan wisata dan juga jumlah uang yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya sebagai berikut :

- 1) Semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia, demikian juga meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mampu melakukan perjalanan dan berwisata ke daerah lain.
- 2) Keputusan untuk cuti bersama pada setiap libur hari raya atau libur lainnya juga ikut mendukung kegiatan berwisata dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya bahkan bila memungkinkan ke negara lain.
- 3) Semakin bertambahnya uang atau dana yang dapat digunakan untuk dapat membiayai kegiatan wisata.
- 4) Semakin tersedianya waktu yang luang dan kesempatan yang dapat digunakan untuk berwisata.
- 5) Semakin mudah cara melakukan perjalanan, lebih cepat dan lebih menyenangkan.
- 6) Kecenderungan biaya hidup lebih tinggi di negara tertentu, juga mendorong orang untuk melakukan wisata ke negara lain yang biaya hidupnya lebih rendah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram sebagai SKPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan disadari adanya beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja yang diharapkan sebagai berikut :

1. Perangkat regulasi teknis pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan yang belum memadai.

2. Sumber daya manusia dan sarana prasarana oprasional yang ada belum dapat secara maksimal mengakomodasi permasalahan pariwisata seni dan budaya yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
3. Belum adanya pertunjukan seni budaya yang dapat dinikmati secara reguler disudut-sudut kota tersentuh oleh masyarakat dan wisatawan.
4. Apresiasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata seni dan budaya masih terbatas dan belum menyeluruh.
5. Kurangnya sosialisasi UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan UU Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya.
6. Tekanan dan kecendrungan terhadap isu keamanan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sosial yang akan berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.
7. Masuknya arus budaya global di kalangan generasi muda yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai seni budaya daerah.
8. Terjadinya Bencana Alam yang merusak infrastruktur sarana dan prasarana menuju ke obyek-obyek wisata dan tempat-tempat lainnya yang menjadi fokus kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kunjungan wisatawan.
9. Penutupan bandara Selaparang Sebagai gerbang masuknya wisatawan di NTB.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Mataram

Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2010 - 2015

1. **Visi** : *“Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”* Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota.
 - b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, termasuk didalamnya seni dan sosial

budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.

- c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
- d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan normanorma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

2. **Misi :**

- a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.
- c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

3. Program Pembangunan :

- a. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

- b. Penataan dan pembinaan kependudukan.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - d. Pengembangan wilayah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal.
 - e. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa
 - f. Perwujudan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
 - g. Pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat.
 - h. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.
 - i. Penataan supra struktur dan infra struktur pemerintahan.
 - j. Penataan kawasan pemukiman & pelestarian lingkungan hidup.
4. Program Unggulan :
- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
 - b. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal.
 - c. Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
5. Kegiatan Pembangunan
- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pendidikan untuk semua (education for all) untuk menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun.
 - Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
 - Subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin.
 - Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi.
 - Pengembangan Sekolah Unggulan.
 - Pengembangan pendidikan alternative berbasis komunitas
 - Pemerataan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan dan optimalisasi peran Dewan Pendidikan.
 - Pengembangan manajemen pendidikan berbasis Good Governance.

- Pengembangan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
 - Subsidi biaya kesehatan bagi warga masyarakat yg terkatagorikan miskin.
 - Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
 - Peningkatan status Puskesmas non perawatan menjadi Puskesmas Perawatan.
 - Pelayanan kepada penyandang cacat dan rehabilitasi pemakai narkoba (NAPZA),
 - Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
 - Peningkatan capaian Millenium Development Goal's (MDG's) khususnya indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejajar dengan daerah yang lebih maju.
 - Peningkatan kerukunan internal dan antar umat beragama dan antar budaya.
 - Pengembangan modal sosial, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, dan memiliki kebanggaan sebagai warga Kota Mataram (Gumi Mentaram) sebagai modal pembangunan.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal, melalui :
- Peningkatan akses permodalan dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha lokal.
 - Menciptakan Wirausaha yang berdayasaing.
 - Peningkatan pengalokasian dana pemberdayaan ekonomi rakyat.
 - Membangun keterkaitan jaringan ekonomi, sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa secara terpadu.
 - Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - Penurunan angka kemiskinan.
 - Penciptaan lapangan kerja baru dalam dan luar negeri.
 - Pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing.

- Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam mendukung daya saing.
- c. Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kegiatan :
- Peningkatan kualitas sarana perekonomian rakyat.
 - Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur transportasi perkotaan.
 - Pembangunan sarana prasarana permukiman yang bersih dan sehat yang didukung dengan drainase dan sanitasi lingkungan sesuai standar.
 - Konservasi sumber daya air yang mampu menjaga ketersediaan penyediaan air minum.
 - Pembangunan prasarana sumber daya air untuk dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Penataan kota dengan menekankan pada ciri kota metropolis dalam bingkai Mataram Metro.
 - Pembangunan Rumah Layak Huni bagi keluarga miskin.
 - Penanganan persampahan secara terpadu.

Sebagai etalase Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan penduduk yang sangat heterogen menggambarkan berbagai suku, agama, adat istiadat, profesi dan berbagai potret heterogenitas masyarakat perkotaan, maka Kota Mataram memiliki posisi khusus yang membutuhkan penanganan yang khusus pula. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi jauh kedepan yang menakhodai pencapaian tujuan sesuai dengan harapan - harapan yang merupakan cita dari seluruh warga kota Mataram.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut :

- I. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- II. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
- perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata .

Pembangunan Kebudayaan dan pariwisata mempunyai peranan penting karena disamping sebagai penggerak perekonomian juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat selain itu pariwisata juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bentuk hiburan . Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktifitas pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata akan menunjukkan gairah yang makin meningkat seiring dengan makin tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai. Untuk itu kepariwisataan Kota Mataram kedepan akan lebih diarahkan pada pengembangan wisata MICE (Meeting Incentive Conference and Exhibition) serta daya dukung bagi kawasan wisata Pulau Lombok dan Sumbawa. Sejalan dengan hal tersebut, harus diupayakan berbagai event-event wisata secara reguler guna meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Mataram.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan pembangunan kepariwisataan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

- Minimnya anggaran pembangunan Destinasi yang teralokasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram telah mengajukan program/kegiatan yang memungkinkan dibiayai melalui APBD Provinsi atau

APBN. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan Destinasi Loang Baloq yang telah mendapat suntikan dana dari Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Belum ada faktor legalitas yang menetapkan kawasan mana yang disebut sebagai kawasan pariwisata.
- Belum ada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas kedepan penyusunan rencana tata ruang wilayah paling tidak ada ruang penetapan kawasan pariwisata. Perencanaan rencana induk pengembangan pariwisata akan menjadi program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012 ini. Dengan adanya tata ruang wilayah penetapan kawasan pariwisata dan rencana induk pengembangan pariwisata, maka penataan dan pembangunan Destinasi Pariwisata akan lebih terarah dan tertata dengan baik.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram sebagai salah satu SKPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang kebudayaan dan Pariwisata dan dalam pengembangannya tidak terlepas dari isu-isu strategis yang mungkin terjadi di Kota Mataram.

Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Penutupan/pindahnya Bandara Selaparang ke Bandara Internasional Lombok di Penujak - Lombok Tengah. Perpindahan bandara tersebut paling tidak dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.
2. Kota Mataram sebagai fungsi pelayanan jasa, khususnya jasa dibidang pariwisata. Oleh karena Kota Mataram sering dijadikan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tentunya harus didukung dengan fasilitas penunjangnya seperti Hotel, Restoran, Travel Agent, Pusat Perbelanjaan Souvenir, Pasar Seni dan Sentra-sentra Industri Kerajinan yang dikemas dengan baik.
3. Konversi lahan-lahan pertanian menjadi kawasan budidaya terbangun melalui penerbitan izin bangunan hendaknya memperhatikan kawasan pemukiman

dengan tetap menjaga dan mempertahankan nilai tradisi lingkungan yang ada saat ini karena itu Penyusunan Rencana Tata Ruang kedepan hendaknya memperhatikan hal tersebut diatas.

Adapun isu - isu strategis yang akan ditinjau melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Meliputi :

1. Membuat Perencanaan Tapak Kawasan (Kawasan Wisata Terpadu)

- Wisata Kuliner
- Sentra Kerajinan Industri kecil
- Wisata tiirta

Sebagai salah satu alternatif pengganti penutupan Bandara Selaparang.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Mataram, perlu difasilitasi dengan ketersediaan :

- Daya Tarik Wisata
- Kawasan Pariwisata
- Jasa Transportasi wisata
- Jasa Perjalanan Wisata
- Jasa Makanan dan Minuman
- Penyediaan Akomodasi
- Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
- Jasa informasi Pariwisata
- Jasa konsultasi pariwisata
- Jasa Pramuwisata

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Walikota yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya*” dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta fasilitas pendukungnya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram maka ditetapkan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram yaitu : “*Terwujudnya Pariwisata Kota Mataram yang Berbasis Nilai Agama dan Budaya Menuju Masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya*” .

a. Penjelasan VISI

Penjelasan Visi : Pariwisata Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Kota Mataram melakukan pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh terpadu dan bertahap melalui penyediaan sumber daya dan daya tarik wisata, fasilitas wisata dan fasilitas umum, dukungan kesiapan dan keterlibatan masyarakat guna peningkatan waktu lama tinggal wisatawan dan banyaknya pengeluaran wisatawan di daerah dengan berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan norma-norma yang merupakan masyarakat lokal.

b. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut dan guna memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai, memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Penataan Data/Informasi tentang Kebudayaan dan Pariwisata.

Data/Informasi pembangunan Kepariwisataan maksimal tersedia secara lengkap mengenai Data Hotel, Rumah Makan dan Restoran, Data Obyek Wisata, Sanggar Seni dan sebagainya. Data tersebut sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan untuk merumuskan program dan kegiatan dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan.

2. Peningkatan Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah.

Peningkatan pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan, Atraksi Pagelaran, Pentas Seni dan Budaya yang semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan

para seniman dalam berkreasi sehingga kedepan sanggar seni yang ada di Kota Mataram dapat eksis dan mandiri.

3. Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Peningkatan pengembangan Destinasi Pariwisata akan dilakukan melalui penataan kebersihan pada Obyek-obyek Wisata, Peningkatan kapasitas SDM dibidang Pariwisata, pembuatan Destinasi Obyek Wisata Baru.

4. Peningkatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dilakukan melalui kegiatan Promosi Didalam maupun Diluar Daerah dengan cara mengikuti Pameran Dalam arti perlu adanya upaya untuk mewujudkan strategi promosi pariwisata yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi, informasi tepat sasaran sehingga mampu mengantisipasi permintaan pasar, mengenalkan keinginan dan motivasi pasar serta mendorong timbulnya permintaan dari dalam negeri dan luar negeri .

5. Peningkatan Penyelenggaraan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan.

Penyelenggaraan Pengaturan Kepariwisataaan berkaitan dengan pengaturan tata ruang Kawasan Wisata, sedangkan pembinaan berkaitan dengan sanggar seni dan kelompok kesenian tradisional yang bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional yang sudah hampir punah di masyarakat.

Untuk pengawasan dan pengendalian kepariwisataan ditujukan terhadap pengawasan dan penertiban serta pengendalian terhadap usaha pariwisata.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram adalah :

1. Tersedianya data-data kepariwisataan seni dan budaya yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam perumusan kebijakan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana kepariwisataan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya .

2. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian dan kemuliaan adat seni dan budaya daerah antara lain melalui pemberian penghargaan dan pagelaran.
3. Terlaksananya event pariwisata tahunan, tersedianya paket wisata yang menarik, terlaksananya pengembangan wisata religi. Terlaksananya pengembangan wisata alam pantai, terlaksananya pengembangan wisata MICE dan kuliner.
4. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik.
5. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya saing terarah dan terpadu dengan mengedepankan sapta pesona dan terbentuknya kelompok masyarakat sadar wisata dalam pelaksanaannya.

b. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya data/informasi yang lengkap dan akurat baik yang terkait dengan pariwisata (sarana prasarana akomodasi, kunjungan wisatawan) dan seni budaya yang ada di Kota Mataram.
2. Terwujudnya peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai aset sekaligus terselenggaranya event-event budaya yang berkualitas dan dikemas sebagai atraksi wisata yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan pariwisata daerah.
3. Bertambahnya keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, melalui terlaksananya event pariwisata tahunan didalam dan diluar daerah, terlaksananya paket-paket wisata (berdaya minat khusus wisata alam) terlaksananya pengembangan wisata religi dengan terbangunnya Islamic Center, terlaksananya revitalisasi pantai Ampenan dan sungai jangkuk, dan terlaksananya rapat/pertemuan lingkup regional di Kota Mataram.
4. Tercapainya peningkatan kualitas promosi pariwisata daerah melalui media cetak maupun media elektronik.

5. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha pariwisata yang profesional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan pariwisata daerah.
6. Terbinanya dan terkoordinasinya usaha pariwisata.
7. Terjalannya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah / Stake holder pariwisata.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

Strategi merupakan Penetapan rencana program dan kegiatan yang didasarkan pada kajian internal dan eksternal sehingga dapat dicapai oleh sasaran organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram memberikan prioritas pada tiga program utama yang selanjutnya akan diimplemtasikan kedalam kegiatan dinas. Program -program tersebut adalah :

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yang menitik beratkan pada kegiatan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Daerah.
- b. Program Pengembangan Keragaman Budaya Daerah, yang menitik beratkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian serta pelestarian Adat Budaya Daerah.
- c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang menitik beratkan pada kegiatan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta peningkatan PAD melalui proses pemberian ijin usaha pariwisata.

Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk pencapaian tujuan dan sasaran adapun kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram adalah sebagai berikut :

- a Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik lingkungan Pemerintah maupun Swasta.
- b. Pemberdayaan institusi dan sumber daya penunjang.
- c. Meningkatkan pemasaran pariwisata dan melestarikan seni dan budaya

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan Kepariwisata dan rencana indikator yang dituangkan dalam Rencana Strategis Budpar Kota Mataram Tahun Anggaran 2011-2015 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Renstra SKPD Disbudpar Kota Mataram ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Budpar Kota Mataram mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleks. Permasalahan pembangunan dibidang Kepariwisata khususnya terhadap upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Budpar Kota Mataram untuk kurun waktu lima tahun berencana melaksanakan beberapa Program.

Untuk mewujudkan dan guna memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai, dipandang perlu untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan beberapa program yang menjadi urusan Pariwisata dan Budaya. Program tersebut antara lain :

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program pengembangan Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Kemitraan
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Budpar Kota Mataram selama kurun waktu lima tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel pada halaman berikut :

BAB. VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel di Excel. Tabel 6.1

